

KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN ARBORETUM GAMBUT

Zulkarnaini, Abdul Sadad, Geovani Meiwanda
Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Email: zulkarnainfisisip@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Arboretum Gambut ditujukan untuk sarana pendidikan dan wisata terutama bagi generasi muda untuk memperkenalkan fungsi lahan gambut sebagai penyangga utama ekosistem di Provinsi Riau pada umumnya. Intinya adalah program ini diharapkan dapat memicu dan mendorong wilayah lain dalam membangun program yang sama, yaitu dengan melibatkan peran serta masyarakat itu untuk pelestarian lahan gambut. Salah satu kelemahan dalam pengelolaan Arboretum Gambut ini adalah kurangnya pemberdayaan semua pihak yang terkait langsung dengan pemanfaatan lahan gambut (Jannah & Zulkarnaini, 2021). Hal ini tercermin dari rendahnya peran mereka dalam perencanaan dan proses manajemen. Sampai batas tertentu, sistem manajemen yang telah dikenal turun temurun tidak dimanfaatkan oleh *stakeholder* yang berkepentingan. Intinya adalah berbagai pihak yang terkait belum menampakkan perannya yang maksimal. Padahal penting bagi masyarakat yang berasal dari kawasan ini untuk ditingkatkan pengetahuannya melalui proses pembinaan yang harus dikaitkan langsung dengan kondisi setempat.

Kata kunci: Arboretum gambut, kapasitas kelembagaan, pengelolaan, lahan gambut

PENDAHULUAN

Penyebab utama kegagalan dalam pengelolaan lahan gambut oleh pemerintah maupun swasta adalah program-program yang dilakukan hanya fokus pada pengembalian fungsi ekologi lahan gambut dan mengabaikan pemberdayaan masyarakat. Padahal dengan melibatkan masyarakat akan diketahui kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Disadari akan pentingnya pengelolaan lahan gambut berbasiskan kepentingan masyarakat, PT. Pertamina UR II Sungai Pakning, Bengkalis, membuat Program Kampung Gambut Bestari sejak tahun 2017. Program Kampung Gambut Bestari pada dasarnya merupakan program CSR Pertamina untuk mengintegrasikan antara pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Bentuknya berupa perbaikan lingkungan, masyarakat lebih berdaya, dan ekonominya lebih maju. Program ini telah menjadi contoh dan inspirasi pengembangan lebih jauh di tempat lain karena bisa menginspirasi stakeholder yang ada. Dalam menjalankan program ini, masyarakat memang dilibatkan secara utuh dalam pengelolaan lahan gambut, mulai penambahan peralatan pemadaman, pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (Forkompa) hingga pelatihan pemadaman api.

Selain itu, program ini melakukan pemanfaatan lahan gambut bekas terbakar melalui pertanian budidaya nanas dan diservikasi pengolahan produk nanas seperti keripik, dodol, manisan, dan selai. Bahkan pihak perusahaan juga membina sembilan Sekolah Dasar dengan menanamkan nilai-nilai Kampung Gambut Berdikari sejak usia dini. Implementasinya adalah sekolah tersebut memiliki kurikulum berbasis lingkungan yang mengangkat isu-isu pencegahan kebakaran lahan dan hutan serta pemanfaatan potensi wilayah gambut. Dengan melibatkan masyarakat pada program restorasi dan pemulihan, dan pelestarian lahan gambut seperti pada Kampung Gambut Berdikari, maka akan muncul kesadaran masyarakat. Dan dari sanalah, masyarakat akan turut serta dalam pelestarian dan pemeliharaan gambut, seiring dengan peningkatan kesejahteraan mereka.

Diantara program pelestarian lingkungan dalam Program Kampung Gambut Berdikari yang menjadi pusat perhatian bagi pemerhati lingkungan adalah pengembangan hutan gambut menjadi Arboretum Gambut. Program ini merupakan pertama di Sumatera

dan menjadikannya sebagai sarana eduwisata yang dikelola masyarakat. Arboretum Gambut ditujukan untuk sarana pendidikan dan wisata terutama bagi generasi muda untuk memperkenalkan fungsi lahan gambut sebagai penyangga utama ekosistem di Provinsi Riau pada umumnya. Intinya adalah program ini diharapkan dapat memicu dan mendorong wilayah lain dalam membangun program yang sama, yaitu dengan melibatkan peran serta masyarakat itu untuk pelestarian lahan gambut.

Pengelolaan Arboretum Gambut sebagai eduwisata kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak dan rendahnya komitmen pihak pengelola. Hal ini dikarenakan partisipasi pemangku kepentingan atau stakeholder erat kaitannya dengan kapasitas yang dimiliki stakeholder sebagai salah satu modal dalam pengelolaannya. Kapasitas ini khususnya adalah kapasitas pengembangan jejaring pengelola yang mutlak dibutuhkan dalam pengelolaan eduwisata yang bersifat multisektoral. Kapasitas pengelola saat ini baru memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya dan menjalankan program pengelolaan eduwisata. Untuk menuju jejaring yang mapan dan mampu menjadi sumber daya bagi program masih memiliki kelemahan, yaitu belum adanya prosedur formal untuk menjalankan program serta rasa kepemilikan bersama dari stakeholder.

Kondisi ini tentunya akan menghambat pengembangan Arboretum Gambut sebagai sarana eduwisata dan sekaligus pelestarian lingkungan. Pemecahan masalah ini dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan adalah dengan pendidikan dan penyuluhan. Topik pendidikan dan penyuluhan yang diperlukan pengelola adalah pendidikan lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan promosi media. Pendidikan berkualitas dan pembelajaran untuk pembangunan berkelanjutan pada pengelola sangatlah dibutuhkan. Penerapan ini sebagai upaya mendorong pengelola untuk secara konstruktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan global serta menciptakan masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan.

METODE

Secara metodologis, rancang bangun kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method*, dimana pendekatan kuantitatif menjadi data pembuka dan berfungsi untuk menopang/menguatkan data dan informasi yang diperoleh dengan pendekatan kualitatif (Brannen, 2005). Beberapa literatur menyebutkan bahwa premis dasar yang mendasari mengapa perlu melakukan penelitian *mixed method* adalah bahwa kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian jika dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Creswell (2014) mengelompokkan *mixed method* ke dalam dua model, yaitu *sequential* (berurutan) dan *concurrent* (campuran). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *concurrent transformative* yaitu gabungan antara model *concurrent triangulation* dan model *concurrent embedded*. Bobot dari masing-masing metode bisa saja sama dan bisa juga tidak sama. Penggabungan data dapat dilakukan dengan *merging*, *connecting* atau *embedding* (mencampur dengan bobot sama, menyambung, dan mencampur dengan bobot tidak sama) penekanannya pada metode kualitatif dan metode kuantitatif sebagai penguatan dari temuan kualitatif (Taskhakkori & Teddlie, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut memang mempunyai ketergantungan yang sangat besar terhadap ekosistem setempat (Noor, 2016). Karena itulah keberadaan mereka dapat berperan ganda: sebagai penjaga sekaligus perusak dari ekosistem tersebut. Untuk itu perlu dibangun suatu pola pengelolaan ekosistem yang melibatkan semua pihak, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata, dan seterusnya keberadaan mereka diharapkan dapat menjaga ekosistem tersebut

(Pramana, 2012). Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat ikut memiliki kepentingan untuk menggunakan segala sumber daya yang tersedia secara bertanggung jawab dan berkesinambungan.

Pengelolaan lingkungan yang tidak dilakukan secara bertanggung jawab tidak hanya menyebabkan kerusakan pada ekosistem itu sendiri, namun juga menyebabkan kerusakan sumberdaya yang terdapat didalamnya, dan sekaligus akan menurunkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut (Darmawan, 2015). Karena itu perlu adanya usaha pemberdayaan dengan sasaran utama adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa pemberdayaan masyarakat diyakini dapat memotivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan sosial ekonomi keluarga, menumbuhkan budaya kerja, serta memupuk semangat untuk bekerjasama (Rohmah, 2014).

Untuk mewujudkan gambut sebagai model pengelolaan lahan dan pendekatan pembangunan berkelanjutan diperlukan dukungan semua pihak. Karena itu penting dilakukan upaya penyesuaian kebijakan dan penguatan kelembagaan masyarakat sebagai pemanfaat kawasan. Saat ini fakta di lapangan menunjukkan bahwa lahan gambut justru terancam kepunahan oleh perambahan kawasan secara ilegal dan pemanfaatan sumber daya yang berlebihan. Perambahan bukan saja berlangsung di berbagai kawasan, termasuk kawasan lindung yang semestinya tidak boleh disentuh oleh aktivitas perusahaan dan masyarakat. Pemerintah sebagai pihak pengelola yang bertanggung jawab dalam perlindungan kelestarian kawasan seperti tidak berdaya menghadapinya.

PT. Pertamina UR II Sungai Pakning meluncurkan Program Kampung Gambut Bestari di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Program ini merupakan upaya pelestarian lingkungan dalam konteks pemeliharaan lahan gambut. Bentuknya berupa pengembangan hutan gambut menjadi arboretum gambut sebagai sarana eduwisata yang dikelola masyarakat. Pendirian arboretum gambut ini merupakan pertama di Sumatera dan merupakan area konservasi dan eduwisata lahan gambut. Ditujukan untuk sarana pendidikan dan wisata terutama bagi generasi muda untuk memperkenalkan fungsi lahan gambut sebagai penyangga utama ekosistem di Provinsi Riau pada umumnya dan Kabupaten Bengkalis khususnya.

Pendidikan dan pembelajaran untuk pembangunan berkelanjutan pada seluruh tingkatan dan di tatanan masyarakat kawasan lahan gambut sangatlah dibutuhkan bagi keberlanjutan ekosistem ini. Salah satu kebutuhan untuk mencegah kerusakan lahan gambut adalah dengan pendidikan yang berkualitas. Topik pendidikan yang diperlukan masyarakat sekitar kawasan lahan gambut berupa pendidikan lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan sosialisasi peraturan yang berhubungan dengan perlindungan ekosistem. Karena itu perlu dilakukan kegiatan pengembangan kapasitas pengelola arboretum gambut agar objek ini berjalan sesuai dengan fungsinya.

Tindakan ini akan menjamin lingkungan makmur secara social dan ekonomi di masa depan. Konsep ini sangat potensial untuk menghubungkan jarak yang terpisah antara dunia usaha dengan kelas yang ada di sekolah, juga antara kelas di sekolah dengan masyarakat. Sehingga dengan hubungan yang erat, lingkungan yang merupakan tempat tinggal manusia diharapkan akan terus terjaga dan mampu mendukung kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Disini memungkinkan setiap manusia untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membentuk masa depan yang berkelanjutan. Perusahaan yang merupakan lembaga bisnis harus mendukung dengan Program CSR yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah maupun kelompok masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan akan meningkatnya kapasitas kelembagaan yang ada.



Gambar 1. Model Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Arboretum Gambut

Berdasarkan Gambar 1 dapat dipahami bahwa secara umum kapasitas kelembagaan arboretum gambut di tingkat sistem terdiri dari hubungan antar individu, kelompok informal, dan organisasi formal yang menghasilkan jaringan hubungan sosial yang disebut dengan modal sosial (Noor, 2007). Mengingat arboretum gambut difungsikan sebagai sarana eduwisata, maka untuk mengukur kapasitas kelembagaan tingkat sistem akan mengacu pada kebijakan pemerintah serta kebijakan perusahaan (CSR) yang berhubungan dengan pembangunan dan pengelolaan eduwisata, dan kemitraan yang dilakukan dengan lembaga lain di luar desa. Hal ini relevan dengan kondisi masyarakat yang hidup di lahan gambut Kecamatan Bukit Batu pada umumnya dan pengelola Arboretum Gambut pada khususnya memiliki standar pemahaman yang terbatas. Pendidikan mereka relative rendah disebabkan tidak adanya motivasi belajar dan dukungan dana untuk melanjutkan pendidikan. Dalam kondisi seperti itu, mereka memerlukan tambahan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pemberian pemahaman secara berkelanjutan, agar tidak salah tujuan dalam pemanfaatan lahan gambut.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan arboretum gambut di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa indikator, yaitu antara lain: 1) Meningkatnya kapasitas pemimpin. Kapasitas disini bukan hanya mengenai kemampuan dan kemauannya untuk menjadi pemimpin secara umum dalam pengelolaan arboretum gambut; 2) Meningkatnya rasa kepemilikan. Rasa kepemilikan merupakan suatu modal utama dari jejaring pengelolaan arboretum gambut dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan rasa kepemilikan yang tinggi menunjukkan bahwa organisasi/kelompok memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian, dan siap untuk menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan; 3) Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan program. Program yang mampu dikelola sepenuhnya oleh jejaring dengan menggunakan sumber dayanya sendiri menunjukkan bahwa jejaring sudah mampu mengelola secara mandiri sehingga jejaring mampu untuk menjadi sumber daya yang utuh bagi pengelolaan ke depan.

KESIMPULAN

Pada dasarnya pengelolaan lahan gambut dalam bentuk pembentukan arboretum gambut membutuhkan dukungan dan komitmen dari semua pihak. Hal ini dikarenakan partisipasi pemangku kepentingan atau stakeholder erat kaitannya dengan kapasitas yang dimiliki stakeholder sebagai salah satu modal dalam pengelolaannya. Kapasitas ini khususnya adalah kapasitas pengembangan jejaring pengelola arboretum gambut yang mutlak dibutuhkan dalam pengelolaan eduwisata yang bersifat multisektoral. Kapasitas

pengelola saat ini baru memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya dan menjalankan program pengelolaan eduwisata. Untuk menuju jejaring yang mapan dan mampu menjadi sumber daya bagi program masih memiliki kelemahan, yaitu belum adanya prosedur formal untuk menjalankan program serta rasa kepemilikan bersama dari stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F., Anda, M., Jamil, A., & Masganti. 2014. *Lahan Gambut Indonesia: Pembentukan, Karakteristik, dan Potensi Mendukung Ketahanan Pangan*. Jakarta: IAARD Press bekerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian RI.
- Darmawan, Budi. 2015. *Rancang Bangun Model Pencegahan Kebakaran Ekosistem Hutan Rawa Gambut*. Pekanbaru: Pascasarjana Universitas Riau.
- Gaveau, D.L.A. et al. 2014. Major atmospheric emissions from peat fires in Southeast Asia during non-drought years: evidence from the 2013 Sumatran fires. *Scientific Reports*.
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasi dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora – IKAPI.
- Kementerian Lingkungan Hidup RI. 2012. *Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan*. Jakarta.
- Masganti, Wahyunto, Ai Dariah, Nurhayati, dan Rachmiwati Yusuf. 2014. Karakteristik dan Potensi Pemanfaatan Lahan Gambut Terdegradasi di Provinsi Riau. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol. 8 No. 1, Juli
- Noor, Muhammad. 2016. *Debat Gambut; Ekonomi, Ekologi, Politik, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noor, Yus Rusliana dan Jill Heyde. 2007. *Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Masyarakat di Indonesia*. Bogor: Wetlands International.
- Page, S. E.. 2016. The Ring of Fire: Tackling Indonesia's Peatland Fire Dynamic. *Proceedings of the International Peat Congress*, Kuching, Malaysia.
- Prafitri, Gita Ratri dan Maya Damayanti. 2016. Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 4 No. 1
- Qomar, Nurul. 2017. *Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Cagar Biosfir Giam Siak Kecil-Bukit Batu Provinsi Riau*. Bogor: Pascasarjana IPB
- Segara, Nuansa Bayu. 2015. *Education for Sustainable Development (ESD)*, Sebuah Upaya Mewujudkan Kelestarian Lingkungan. *Jurnal Sosio Didaktika*, Vol. 2, No. 1
- Sujianto dan Zulkarnaini, 2017. *Collaboratif Institutional Model*, Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sutikno, Sigit, et al. 2017. *Kajian Hidrologi Lanskap Giam Siak Kecil_Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*. Pekanbaru: UR Press
- Zulkarnaini dan Hasim As'ari, 2019. Diseminasi Peraturan Desa (Perdes) untuk Pencegahan Kebakaran di Lahan Gambut. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 2, Oktober.
- Zulkarnaini dan Evawani Elysa Lubis, 2018. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ekosistem Lahan Gambut. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 10, No. 2, Oktober.
- Zulkarnaini dan Evawani Elysa Lubis, 2019. Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut Melalui Penerapan Peraturan Formal Tingkat Desa. *Prosiding SENPLING 2019*, 16 November.
- Zulkarnaini, Z., Meiwanda, G., Elysa Lubis, E., Sundari Nasution, M., & Kusuma Habibie, D. 2020. Peatland Management Based on Education for Sustainable Development (ESD). In *Journal of Physics Conference Series* (Vol. 1655, No. 1, p. 012142)